

# IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DENGAN METODE DELPHI PADA GEDUNG DPR RI

*(Factors Identification Affecting Occupational Health and Safety System Using Delphi Method at Indonesia Representative Council Building)*

**Prasetyo Hari Wibowo<sup>1</sup>, Mega Waty<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Sipil Universitas Tarumanagara

E-Mail: [phbowo@gmail.com](mailto:phbowo@gmail.com)<sup>1</sup> [mega@ft.untar.ac.id](mailto:mega@ft.untar.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima 8 November 2023, Disetujui 26 Desember 2023

## ABSTRAK

*Kelalaian* dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi oleh pihak kontraktor yaitu insiden atau peristiwa kebakaran *lift* di Gedung DPR RI dapat mengakibatkan terganggunya produktivitas dan kelangsungan aktivitas legislatif. Penerapan SMK3 adalah tindakan preventif untuk mencegah insiden yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal di tempat kerja. Dampaknya adalah penundaan dari agenda-agenda penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Gedung DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kuisioner, wawancara mendalam dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi penerapan SMK3 di Gedung DPR RI. Kompetensi, kebijakan, partisipasi, komitmen, dan pengawasan merupakan faktor-faktor pengembangan SMK3 yang sudah tervalidasi oleh para pakar. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di Gedung DPR RI. Hasil penelitian ini memiliki implikasi dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Gedung DPR RI dan mungkin dapat diterapkan dalam konteks organisasi serupa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) untuk membentuk strategi serta rekomendasi dalam mengurangi insiden kecelakaan kerja di lingkungan kerja.

**Kata Kunci:** SMK3, Manajemen, Bangunan Gedung

## ABSTRACT

*Negligence in carrying out renovation work by the contractor, namely elevator fire incidents or events at the Indonesia Representative Council Building can disrupt the productivity and continuity of legislative activities. Implementation of OHSMS is a preventive action for incidents that could result in fatality in the workplace. The impact is the postponement of important agendas. This research aims to analyze the factors that influence the OHSMS in Indonesia Representative Council Building. Qualitative approach is used with questionnaires, in-depth interviews and document analysis as data collection methods. The results identified a number of key factors that influence the implementation of the OHSMS in the Indonesia Representative Council Building. Competency, regulations, participation, commitment, and supervision are the factors that used for developing OHSMS, also already validated by experts. These factors are interrelated and contribute to creating a safe and healthy work environment in the Indonesia Representative Council Building. The results of this research have important implications in improving OHS in the Indonesia Representative Council Building and may be applied in similar organizational contexts. All of this research results can be use for develop occupational health and safety management system by building a strategy for reducing accident at work environment.*

**Keywords:** OHSMS, Management, Building Construction

## PENDAHULUAN

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di dalam industri memiliki tingkat penting yang sangat tinggi. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi kesepakatan atau komitmen terhadap aturan yang berkaitan dengan SMK3, perencanaan yang cermat terkait SMK3, pelaksanaan SMK3 sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah disetujui, pengukuran serta evaluasi pelaksanaan SMK3, dan juga peninjauan berkaitan dengan peningkatan aspek keselamatan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek (Ervianto, 2005)

Pada tanggal 29 November 2020, terdapat insiden kebakaran lift di Gedung Nusantara I. Kebakaran tersebut berakar dari kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi oleh pihak kontraktor (Abdu, 2020). Insiden atau peristiwa di Gedung DPR RI, hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kelangsungan aktivitas legislatif. Dampaknya adalah penundaan dari agenda-agenda penting, termasuk sidang, saat terjadi insiden kecelakaan kerja atau kebakaran. Selama kebakaran di gedung DPR, sidang harus ditunda sementara untuk melakukan evakuasi seluruh staf, karyawan, dan anggota DPR RI. Penerapan SMK3 adalah tindakan preventif untuk mencegah kejadian atau insiden yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal di tempat kerja (Lo, 2012).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas kerja. Hal ini bertujuan agar lingkungan kerja dapat menjadi tempat yang aman, efisien, dan produktif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK3 juga mencakup evaluasi kombinasi antara potensi bahaya yang mungkin timbul dan dampak yang dapat mengakibatkan kejadian yang serius (OHSAS, 2007).

Kompetensi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kompetensi disini adalah kompetensi di *level* manajemen maupun pekerja. Kompetensi direktur (top manajemen) merupakan pemahaman seorang pimpinan terhadap permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat berpengaruh terhadap jalannya bisnis dan operasional, serta dapat mengetahui bagaimana menanggulangi permasalahan tersebut (Lornudd et al., 2021). Peran dari pimpinan yang berkompeten dapat mempengaruhi jalannya SMK3 pada suatu badan atau organisasi.

Pimpinan yang baik disertai kompetensi pekerja yang berpengalaman dapat menekan implementasi SMK3 secara teratur dan sesuai dengan kebijakan. Kompetensi dapat dimunculkan dengan diadakannya pelatihan terkait SMK3. Pelatihan SMK3 merupakan wujud dari keinginan pimpinan dalam meningkatkan kompetensi pekerjaanya (Hossain et al., 2015).

Kebijakan merupakan aturan atau regulasi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari pemerintah maupun aturan internal organisasi. Peraturan pemerintah terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini mengatur tentang implementasi SMK3 terhadap instansi ataupun badan untuk menjaga dan mewujudkan keselamatan kerja di lingkungan atau area kerja. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

Partisipasi keterlibatan seluruh aspek dalam penerapan SMK3 merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keselamatan di area kerja. Komunikasi antar orang, mulai dari pekerja dengan pekerja sampai pekerja dengan pimpinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap jalannya SMK3 dengan baik (Kaassis & Badri, 2018). Pekerja dapat melaporkan suatu kejadian yang membahayakan di lingkungan kerja dan nantinya pimpinan akan merespon kejadian itu. Pimpinan dapat memberikan gambaran atau *benchmarking* terhadap suatu permasalahan keselamatan kerja kepada pekerja untuk memberikan wawasan yang lebih luas terkait SMK3, nantinya pekerja akan memberikan *feedback* berupa pemahaman dan aksi preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (Kristensen, 2011).

Komitmen suatu perusahaan dalam menjalankan SMK3 sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu sistem keselamatan kerja. Pengalokasian aset, respon suatu permasalahan keselamatan, proses identifikasi potensi bahaya dan risiko, dan penerapan budaya serta standar keselamatan yang baik merupakan komitmen top manajemen dalam menjalankan SMK3 di suatu perusahaan (Lo, 2012). Visi misi yang baik dari perusahaan dan perencanaan strategi penanggulangan keselamatan kerja juga merupakan contoh dari komitmen perusahaan melalui top manajemen dalam penerapan SMK3. Nantinya, pekerja akan diberikan arahan untuk berkomitmen terhadap strategi pengelolaan bahaya yang terjadi di lingkungan kerja (Hossain et al., 2015).

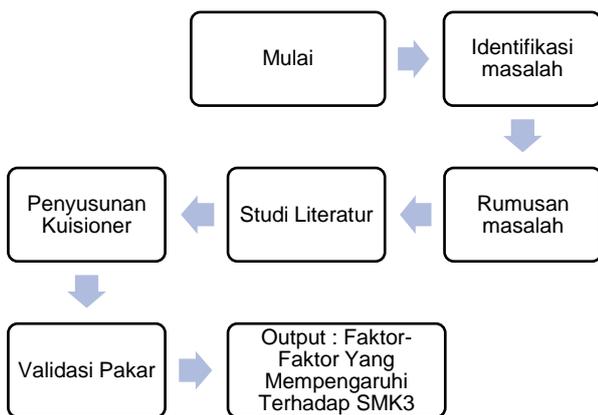
Langkah terakhir setelah dijalankannya SMK3 adalah tahap pengawasan. Melakukan pengecekan setiap komponen yang sudah direncanakan menjadi proses dalam tahap pengawasan. *Standard operation* wajib dilakukan *monitoring & controlling* untuk melihat kesiapan dan ketaatan pekerja dalam menjalankan

SMK3 (Putri et al., 2021). Risiko yang dapat timbul setelah dilakukannya *hazard identification* juga wajib diawasi dan diamati. Risiko yang timbul dan sudah diidentifikasi dapat berubah kategori risikonya berdasarkan waktu dan menjadikan risiko tersebut menjadi *risk urgent list* (Institute, 2017).

Pada Gedung DPR RI sendiri, kondisi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) masih tergolong belum matang atau dalam tahap reaktif (Machfudiyanto et al., 2018). Hal ini karena personil pada lingkungan kerja di area Gedung DPR RI bertindak setelah terdapat kejadian kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Gedung DPR RI.

**METODE**

Tahap ini menggunakan analisa data berupa metode delphi. *Delphi method* merupakan metode yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli atau pakar yang relevan atau sesuai terhadap penelitian (Arikunto, 2013). Tahap ini mempunyai tujuan yaitu validasi variabel ke pakar maupun ahli. Studi kasus dilakukan di gedung DPR di Jakarta.



**Gambar 1.** Alur Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Gedung DPR RI terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dilakukan studi literatur untuk mendapatkan faktor-faktor terkait pengembangan SMK3. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuisisioner yang akan diajukan kepada pakar. Hasil akhir penelitian ini merupakan faktor-faktor pengembangan SMK3 di Gedung DPR RI yang telah dilakukan validasi oleh pakar. Pakar yang disertakan pada tahap ini berjumlah minimal 3 responden dengan pengalaman minimal 10 tahun di bidang keselamatan kerja suatu badan atau perusahaan, serta berpendidikan minimal S1. Pada tahap ini responden akan memberikan tanggapan dan validasi variabel yang berpengaruh terhadap SMK3 di Gedung DPR RI. Tujuan dari validasi pakar adalah untuk memvalidasi, revisi, ataupun menghilangkan

variable yang kurang relevan (Murti & Muslim, 2023). Validasi pakar dimana tahap ini, pakar akan memvalidasi variabel (faktor) yang mempengaruhi SMK3. Ketentuan responden dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja dan aktif sebagai praktisi, khususnya dalam keselamatan dan kesehatan kerja suatu badan atau perusahaan (*safety officer*).
2. Memiliki minimal 10 tahun pengalaman dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pendidikan minimal adalah strata 1 atau S1.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses validasi pakar untuk melakukan validasi terkait Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Gedung DPR RI dengan Metode yang digunakan adalah dengan kuisisioner yang disebar pada pakar, dengan minimum jumlah pakar adalah 3 orang sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan.

Total terdapat 5 Pakar yang bersedia melakukan validasi terkait variabel-variabel untuk Pengaruh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di gedung DPR RI. Pakar-pakar tersebut juga sudah masuk ke-dalam kriteria yang telah dicantumkan pada penjelasan sebelumnya. Kriteria pakar akan dijelaskan pada **Tabel 1.** sampai **Tabel 3.** Kriteria Pakar.

Dari validasi pakar yang telah dilakukan, didapatkan faktor-faktor yang valid dan berikut merupakan rekapitulasi dari hasil validasi pakar yang telah dilakukan yang akan dijelaskan pada **Tabel 4.** Hasil Validasi Pakar.

**Tabel 1.** Kriteria Pakar 1 - 2

Kategori	Pakar 1	Pakar 2
Nama	W	AIH
Instansi	Sekjen DPR RI	Sekjen DPR RI
Jabatan	Kepala Bagian Gedung dan Instalasi	PPK Bidang Pengelolaan Bangunan dan Wisma
Pendidikan	S2	S1

Sumber: Hasil Olahan Penulis

**Tabel 2.** Kriteria Pakar 3 – 4

Kategori	Pakar 3	Pakar 4
Nama	AP	LZ
Instansi	Sekjen DPR RI	PAKKI
Jabatan	Tenaga Ahli Madya MEP	Ketua Umum
Pendidikan	S1	S1

Sumber: Hasil Olahan Penulis

**Tabel 3.** Kriteria Pakar 5

Kategori	Pakar 5
Nama	MD
Instansi	Sekjen DPR RI
Jabatan	Tenaga Ahli Utama
Pendidikan	S1

Sumber: Hasil Olahan Penulis

**Tabel 4.** Hasil Validasi Pakar

Kode	Variabel	Sub-Kode	P1	P2	P3	P4	P5
X.1	Kompetensi	X1.1	✓	✓	✓	✓	✓
		X1.2	✓	✓	✓	✓	✓
		X1.3	✓	✓	✓	✓	✓
		X1.4	✓	✓	✓	✓	✓
		X1.5	✓	✓	✓	✓	✓
X.2	Kebijakan	X2.1	✓	✓	✓	✓	✓
		X2.2	✓	✓	✓	✓	✓
		X2.3	✓	✓	✓	✓	✓
		X2.4	✓	✓	✓	✓	✓
		X2.5	✓	✓	✓	✓	✓
X.3	Partisipasi	X3.1	✓	✓	✓	✓	✓
		X3.2	✓	✓	✓	✓	✓
		X3.3	✓	✓	✓	✓	✓
		X3.4	✓	✓	✓	✓	✓

		X3.5	✓	✓	✓	✓	✓
		X4.1	✓	✓	✓	✓	✓
		X4.2	✓	✓	✓	✓	✓
X.4	Komitmen	X4.3	✓	✓	✓	✓	✓
		X4.4	✓	✓	✓	✓	✓
		X4.5	✓	✓	✓	✓	✓
		X5.1	✓	✓	✓	✓	✓
		X5.2	✓	✓	✓	✓	✓
X.5	Pengawasan	X5.3	✓	✓	✓	✓	✓
		X5.4	✓	✓	✓	✓	✓
		X5.5	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Olahan Penulis (Wawancara)

Seluruh pakar setuju kepada seluruh faktor pengembangan SMK3 di Gedung DPR RI. tetapi, terdapat beberapa catatan masukan oleh pakar :

- A. Dalam faktor Kompetensi adalah sebagai berikut:**
- Pemahaman Pimpinan Terhadap Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1.1): Pemahaman pimpinan tentang pentingnya K3 dapat berdampak signifikan pada jalannya bisnis dan operasional. Pemimpin yang menyadari bahwa kecelakaan atau masalah kesehatan kerja dapat mengganggu produktivitas, meningkatkan biaya operasional, dan merusak reputasi perusahaan, cenderung lebih berkomitmen untuk memprioritaskan K3 dalam kebijakan dan keputusan bisnis.
  - Pekerja Berpengalaman dalam Penerapan SMK3 (X1.2): Pekerja yang berpengalaman dalam penerapan SMK3 karena telah menerima pelatihan yang efektif dapat membantu menjalankan prosedur keselamatan dengan baik. Mereka memahami instruksi dari pimpinan dan dapat mengidentifikasi serta mengatasi potensi bahaya dengan lebih efisien.
  - Top Manajemen yang Terbuka untuk Pembelajaran dari Industri Lain (X1.3): Top manajemen yang terbuka untuk belajar dari studi kasus dalam industri lain dapat mendapatkan wawasan tambahan tentang cara meningkatkan K3 di organisasi mereka. Mereka dapat mengadopsi praktik terbaik dari industri serupa atau bahkan berbeda untuk memperbaiki SMK3 mereka.

- d) Kolaborasi dengan Pihak Akademisi (X1.4):  
Kolaborasi antara manajemen dan pihak akademisi dalam mengembangkan SMK3 dapat membawa masukan yang berharga. Akademisi dapat membantu menghadirkan perspektif ilmiah dan riset terbaru dalam pengembangan dan perbaikan SMK3.
- e) Visi Misi yang Ditetapkan oleh Top Manajemen (X1.5):  
Visi dan misi yang ditetapkan oleh top manajemen yang mencakup tujuan untuk mencapai kinerja keselamatan yang baik dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh organisasi. Ini membantu dalam mengarahkan upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan K3 yang ditetapkan.

**B. Dalam faktor Kebijakan adalah sebagai berikut:**

- a) Regulasi Pemerintah di Indonesia dan Luar Negeri (X2.1):  
Di Indonesia, penerapan SMK3 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Ini adalah peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki SMK3 yang efektif guna melindungi kesejahteraan pekerja. Di luar negeri, setiap negara memiliki regulasi sendiri yang mengatur SMK3, dan ini dapat bervariasi. Misalnya, di Amerika Serikat, ada Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.
- b) Program Kerja Perusahaan untuk SMK3 (X2.2):  
Program kerja perusahaan mencakup semua kegiatan dan acara yang bertujuan untuk menciptakan dan menjalankan SMK3 yang efisien. Ini bisa termasuk pelatihan keselamatan, audit keselamatan rutin, pengembangan prosedur keselamatan, kampanye keselamatan, dan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya.
- c) Peraturan Perusahaan yang Mengatur SMK3 (X2.3):  
Peraturan internal perusahaan adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan penerapan SMK3 yang sesuai. Ini bisa mencakup tata tertib keselamatan, tindakan disipliner terhadap pelanggaran keselamatan, dan prosedur darurat.
- d) Peraturan Internasional sebagai Pedoman (X2.4):  
Selain regulasi nasional, ada peraturan internasional yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk penerapan SMK3, seperti standar ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan dapat mengacu pada standar ini untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar internasional dalam hal keselamatan kerja.
- e) Kontrak Kerja yang Mengatur Kesanggupan Pekerja (X2.5):  
Kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja dapat mencantumkan kewajiban pekerja terkait

keselamatan kerja. Ini bisa mencakup kewajiban pekerja untuk mengikuti prosedur keselamatan, melaporkan bahaya, dan berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan.

**C. Dalam faktor partisipasi adalah sebagai berikut:**

- a) Peran Manajemen dalam Merencanakan Strategi SMK3 (X3.1):  
Manajemen memiliki peran kunci dalam merencanakan strategi penerapan SMK3. Mereka harus mengidentifikasi risiko-risiko potensial di lingkungan kerja, menentukan tujuan dan target keselamatan, serta mengembangkan rencana tindakan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup alokasi sumber daya, pembentukan tim keselamatan, dan penetapan tanggung jawab.
- b) Keterlibatan Pekerja dalam Penerapan SMK3 (X3.2):  
Pekerja juga memiliki peran penting dalam penerapan SMK3. Mereka harus ikut andil dalam menjalankan prosedur keselamatan, mengikuti aturan yang ditetapkan, dan melaporkan potensi bahaya atau masalah keselamatan. Manajemen harus mendukung partisipasi pekerja dan menyediakan pelatihan yang diperlukan.
- c) Pengkajian Ulang dan Perbaikan oleh Top Manajemen (X3.3):  
Top manajemen harus secara berkala melakukan pengkajian ulang terhadap SMK3 yang sudah ada. Ini mencakup evaluasi efektivitas langkah-langkah keselamatan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan di tempat kerja.
- d) Kesadaran Pekerja akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X3.4):  
Pekerja perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka harus memahami risiko yang ada di lingkungan kerja mereka dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan peralatan, prosedur keselamatan, dan pelaporan insiden.
- e) Analisis Potensi Bahaya Bersama-sama (X3.5):  
Manajemen bersama pekerja perlu merencanakan dan menganalisis potensi bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko potensial. Proses ini dapat melibatkan inspeksi rutin, audit keselamatan, dan pemantauan kondisi kerja.
- D. Dalam faktor komitmen adalah sebagai berikut:**
- a) Manajemen Bertanggung Jawab dalam Perencanaan, Implementasi, dan Pengawasan SMK3 (X4.1):  
Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, menerapkan, dan mengawasi SMK3. Ini mencakup mengidentifikasi risiko-risiko potensial, mengembangkan kebijakan keselamatan, penetapan prosedur kerja aman, dan memastikan pemenuhan

terhadap peraturan yang berlaku. Manajemen juga harus memantau pelaksanaan SMK3 secara terus-menerus dan melakukan perbaikan bila diperlukan.

- b) Kepatuhan Pekerja Terhadap Prosedur SMK3 (X4.2): Pekerja memiliki peran penting dalam penerapan SMK3. Mereka harus secara teratur dan taat menjalankan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Ini mencakup penggunaan peralatan pelindung diri (PPE), pelaporan insiden atau bahaya, serta partisipasi dalam pelatihan keselamatan.
- c) Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerja (X4.3): Perusahaan atau organisasi harus memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai kepada pekerja. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang risiko, penggunaan alat-alat keselamatan, tata cara tindakan darurat, dan pentingnya keselamatan kerja. Pekerja yang terlatih lebih mungkin mematuhi prosedur keselamatan.
- d) Komunikasi Antara Top Manajemen dan Pekerja (X4.4): Komunikasi yang efektif antara top manajemen dan pekerja sangat penting. Ini mencakup berbagi informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan kerja. Keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan keselamatan juga dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko.
- e) Anggaran Keselamatan yang Memadai (X4.5): Top manajemen harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung implementasi SMK3 yang efisien dan efektif. Ini mencakup dana untuk pelatihan, peralatan keselamatan, pemeliharaan, audit keselamatan, dan inspeksi.

#### **E. Dalam faktor Pengawasan adalah sebagai berikut:**

- a) Pengecekan Hasil Pekerjaan sesuai Standar yang Ditentukan (X5.1): Pengecekan hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah langkah penting dalam menjaga keselamatan kerja. Ini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur keselamatan yang ada, sehingga mengurangi risiko kecelakaan atau cedera.
- b) Pengawasan dan Pemeriksaan Kelengkapan APD dan Kelayakan Peralatan Bantu (X5.2): Pengawasan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelayakan peralatan bantu (misalnya, mesin atau alat berat) adalah bagian penting dari SMK3. Memastikan bahwa pekerja memiliki dan mengenakan APD yang sesuai serta menggunakan peralatan yang aman membantu melindungi mereka dari bahaya yang mungkin terjadi.
- c) Evaluasi Berkala oleh Manajemen dan Tim terkait Penerapan SMK3 (X5.3):

Evaluasi berkala adalah proses penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem SMK3 dan mengusulkan perbaikan. Manajemen dan tim terkait harus secara rutin mengevaluasi keefektifan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan SMK3 untuk pengembangan sistem yang lebih baik.

- d) Kontrol terhadap Key Performance Index (KPI) atau Capaian Hasil Kerja (X5.4): Menggunakan KPI atau capaian hasil kerja yang terkait dengan keselamatan kerja dapat membantu perusahaan menjaga tujuan keselamatan dan kesehatan kerja tetap tercapai. Ini memungkinkan manajemen untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengambil tindakan korektif.
- e) Monitoring Beban Kerja untuk Mencegah Kecelakaan Kerja (X5.5): Monitoring beban kerja dan jam kerja pekerja adalah cara untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi akibat kelelahan atau stres. Manajemen perlu memastikan bahwa beban kerja pekerja tetap dalam batas yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### **F. Analisis Deskriptif (Faktor-Faktor)**

Dari hasil pengisian kuisioner oleh pakar ahli, maka didapat data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SMK3. Dari pengisian tersebut dihasilkan suatu analisis deskriptif berisi hasil antara lain:

- a) Kompetensi  
Karyawan dan manajemen perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan yang tepat dan sertifikasi kompetensi seringkali dibutuhkan. Seluruh personil pada Gedung DPR RI wajib memiliki kompetensi yang baik berdasarkan hasil seleksi pada saat penerimaan kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pada Penelitian Rudi Wijaya Kompetensi pekerja adalah karakteristik dasar seseorang individu yang komitmen manajemen, peraturan dan perosedur K3 (Wijaya, 2018).
- b) Kebijakan  
Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan sangat mempengaruhi implementasi SMK3. Kebijakan ini mencakup alokasi sumber daya, standar yang harus dipatuhi, dan prosedur yang harus diikuti. Kebijakan yang kuat biasanya mempengaruhi budaya keselamatan di perusahaan secara positif. Pada Gedung DPR RI kebijakan berupa pakta komitmen keselamatan kerja wajib digaungkan sebagai bentuk prosedur tetap pekerjaan, agar tercipta kesadaran keselamatan oleh seluruh personil. Menurut Muhammad Agis Firdaus kebijakan perusahaan merupakan faktor penting dalam keputusan operasional (Firdaus, 2023).

- c) Partisipasi  
Partisipasi aktif dari semua tingkatan organisasi, termasuk karyawan dan manajemen, sangat penting. Hal ini bisa dalam bentuk keterlibatan dalam rapat keselamatan, pelaporan insiden, atau memberikan masukan untuk perbaikan. Seluruh personil pada Gedung DPR RI dapat turut ikut serta berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Menurut Mohammad Afief Pentingnya partisipasi pekerja untuk membantu perencanaan SMK3 dan manajemen risiko bahaya di lingkungan kerja (Afief et al., 2016).
- d) Komitmen  
Komitmen dari manajemen puncak memainkan peran kritis. Tanpa dukungan dan kepemimpinan dari manajemen, sistem ini kemungkinan besar tidak akan efektif. Komitmen ini seringkali ditunjukkan melalui alokasi sumber daya dan prioritas strategis. Pihak manajemen pada Gedung DPR RI dapat melakukan alokasi sumber daya berdasarkan kompetensi dan keahlian personil. Menurut penelitian Shabira komitmen K3 merupakan salah satu elemen penting dalam SMK3 yang termasuk ke dalam komitmen manajemen (Noviandini et al., 2017).
- e) Pengawasan  
Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari implementasi dan efektivitas SMK3 adalah krusial. Ini termasuk audit internal dan eksternal, pelaporan, dan analisis data kecelakaan dan insiden. Pengawasan yang baik dapat dilakukan oleh seluruh manajemen Gedung DPR RI dengan melakukan *audit* atau inspeksi rutin pekerjaan. Pengawasan ditujukan untuk menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah guna melindungi pekerjaan dan mengawasi jalannya perusahaan (Anita, 2016).

## KESIMPULAN

Dari data penelitian analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di gedung DPR RI adalah Kompetensi, Kebijakan, Partisipasi, Komitmen, dan Pengawasan. Kompetensi dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan dan manajemen dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko. Lalu adalah faktor kebijakan, dimana implementasi SMK3 sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan yang diterapkan. Kebijakan ini mencakup bagaimana sumber daya dialokasikan. Setelah kebijakan diakomodir dengan baik, partisipasi semua tingkatan organisasi, termasuk karyawan dan manajemen, harus aktif dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, komitmen dari manajemen puncak sangat krusial. Tanpa dukungan dan kepemimpinan mereka, sistem ini mungkin tidak akan berjalan efektif. Terakhir adalah faktor pengawasan, dimana pengawasan adalah Melakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas SMK3 adalah hal yang sangat penting. Ini mencakup melakukan audit baik secara internal maupun eksternal, melaporkan temuan, dan menganalisis data kecelakaan dan insiden.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, khususnya kepada pakar-pakar yang telah menjadi responden untuk memvalidasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap SMK3 di Gedung DPR RI dan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM UNTAR) yang sudah membantu mendanai kegiatan penelitian ini.

## REFERENSI

- Abdu, F. P.** (2020). Gedung Nusantara I DPR RI Terbakar (Media Berita Online). *ANTARA NEWS*.
- Afief, M., Widjasena, B., & Kurniawan, B.** (2016). Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Peran Petugas K3 dalam Mendorong Partisipasi Pekerja Kontrak untuk Membantu Perencanaan Manajemen Risiko di Pembangunan Gedung Y. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 332-341.
- Anita, O. I.** (2016). Pengawasan Pemerintah Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 1(4), 678-693.
- Arikunto, S.** (2013). Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta: Bandung*.
- Ervianto, W. I.** (2005). Manajemen proyek konstruksi edisi revisi. *Yogyakarta: Andi*.
- Firdaus, M. A.** (2023). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada CV Agis Truss Universitas Islam Indonesia*].
- Hossain, M. A., Hossain, M. M., Tarannum, S., & Chowdhury, T. H.** (2015). Factors affecting OHS practices in private universities: An empirical study from Bangladesh. *Safety science*, 72, 371-378.
- Institute, P. M.** (2017). *A Guide To The Project Management Body of Knowledge 6th Edition*.
- Kaassis, B., & Badri, A.** (2018). Development of a preliminary model for evaluating occupational health and safety risk management maturity in small and medium-sized enterprises. *Safety*, 4(1), 5.
- Kristensen, P. H.** (2011). Managing OHS: A route to a new negotiating order in high-performance work organizations? *Safety science*, 49(7), 964-973.

- Lo, D.** (2012). OHS stewardship-integration of OHS in corporate governance. *Procedia Engineering*, 45, 174-179.
- Lornudd, C., Frykman, M., Stenfors, T., Ebbevi, D., Hasson, H., Sundberg, C. J., & von Thiele Schwarz, U.** (2021). A champagne tower of influence: An interview study of how corporate boards enact occupational health and safety. *Safety science*, 143, 105416.
- Machfudiyanto, R. A., Latief, Y., Suraji, A., & Soeharso, S. Y.** (2018). Improvement of policies and institutional in developing safety culture in the construction industry to improve the maturity level, safety performance and project performance in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10), 1022-1032.
- Murti, C. K., & Muslim, F.** (2023). Relationship between Functions, Drivers, Barriers, and Strategies of Building Information Modelling (BIM) and Sustainable Construction Criteria: Indonesia Construction Industry. *Sustainability*, 15(6), 5526.
- Noviandini, S., Ekawati, E., & Kurniawan, B.** (2017). Analisis Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Sistem Manajemen K3 (Smk3) di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 639-650.
- OHSAS, B. S.** (2007). 18001: 2007. *Occupational health and safety management systems*. London.
- Putri, A. H., Latief, Y., Sagita, L., & Machfudiyanto, R. A.** (2021). Developing Standard Operational Procedures for Maintenance and Repair of Mechanical and Electrical Component in Government Building to Improving Safety Planning. *Journal of Physics: Conference Series*,
- Wijaya, R.** (2018). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja karyawan perusahaan kontraktor di Surabaya. *axial: jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi*, 6(2), 79-88.